



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT KOMISI VI DPR RI  
B I D A N G  
PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM, BUMN,  
INVESTASI, DAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL**

---

Tahun Sidang	: 2009-2010
Masa Persidangan	: II
Rapat ke	: 4
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, tanggal	: Rabu, 20 Januari 2010
W a k t u	: Pukul 09.00 s/d 17.00 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VI DPR RI
A c a r a	: 1. Pengantar Ketua Rapat; 2. Penjelasan Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, Menteri Keuangan, Menteri BUMN dan Menteri Koperasi dan UKM pertanyaan tertulis Komisi VI DPR RI. 3. Tanya Jawab 4. Penutup
Ketua Rapat	: Ir. Airlangga Hartarto, MT, MBA didampingi Wakil Ketua Komisi VI DPR RI (Aria Bima, Ir. Agus Hermanto, MM, dan Ir. Nurdin Tampubolon)
Sekretaris Rapat	: Wahyu Prameswari, SH, M.Si (Kabagset Komisi VI)
Hadir	: A. Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, Menteri Keuangan, Menteri BUMN dan Menteri Koperasi dan UKM beserta jajaran B. orang dari 51 orang Anggota.

**KESIMPULAN RAPAT**

**I. PENDAHULUAN**

1. Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan dengan Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, Menteri Keuangan, Menteri BUMN dan Menteri Koperasi dan UKM dibuka pada pukul 09.30 WIB setelah kuorum terpenuhi, dan sifat rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menginformasikan bahwa Rapat Dengar Pendapat kali ini agenda utamanya adalah Pembahasan terhadap dampak penerapan Asean China Free Trade Agreement (AC-FTA).
3. Ketua Rapat memberikan kesempatan Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, Menteri Keuangan, Menteri BUMN dan Menteri Koperasi dan UKM untuk menyampaikan penjelasan atas pertanyaan tertulis Komisi VI DPR RI

4. Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada yang terhormat Bapak/Ibu Anggota Komisi VI DPR RI untuk menanggapi atas penjelasan Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, Menteri Keuangan, Menteri BUMN dan Menteri Koperasi dan UKM

## II. KESIMPULAN

1. Komisi VI DPR RI meminta Pemerintah cq Kementerian Perdagangan untuk segera mengirimkan notifikasi ke Sekretariat ASEAN dan Pemerintah China guna melakukan penangguhan dan renegoisasi terhadap sejumlah pos tarif untuk berbagai sektor industri sebagai berikut:
  - a. Tekstil dan produk tekstil
  - b. Makanan dan minuman
  - c. Petrokimia
  - d. Alat-alat dan mesin hasil pertanian
  - e. Alas kaki
  - f. Sintetik fiber
  - g. Elektronika
  - h. Kabel dan peralatan listrik
  - i. Industri permesinan
  - j. Besi dan Baja
  - k. Industri Komponen manufaktur otomotif
  - l. Kosmetik dan Jamu
  - m. Mebel dan furniture
  - n. Ban
  - o. Jasa konstruksi / *engineering procurement construction (EPC)*
2. Komisi VI DPR RI juga meminta Pemerintah segera melakukan pembenahan dan memperkuat kelembagaan antara lain: KADI, KPPI, BSN, BPEN dan BPOM dengan dukungan SDM yang kompeten dan profesional. Komisi VI DPR RI berpendapat perlunya reformasi birokrasi yang berkaitan dengan dukungan anggaran terhadap keberadaan lembaga-lembaga tersebut perlu diperbesar.
3. Dalam rangka meningkatkan perlindungan pada industri dalam negeri menghadapi *unfair trade*, Komisi VI DPR RI juga mendesak agar segera dilakukan usaha untuk memperkuat dan memperluas penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI), dengan mengajukan notifikasi penggunaan SNI ke WTO serta memperluas penerapan SNI wajib untuk seluruh produk yang dimasukkan dalam kategori NT1 dan NT2 terutama yang berhubungan dengan keamanan, kesehatan, keselamatan dan lingkungan, serta penggunaan labelisasi dan optimalisasi instrumen subsidi, *anti dumping*, *countervailing duties*, *safeguard* dan berbagai strategi *counter measures*.

4. Dalam upaya meningkatkan daya saing produk-produk nasional, sesuai dengan aspirasi yang berkembang dari Rapat Dengar Pendapat Umum sampai dengan Rapat Kerja saat ini, Komisi VI DPR RI mendesak Pemerintah cq Kementerian terkait untuk mempercepat:

- Perbaikan akses sarana dan prasarana (infrastruktur pendukung) seperti jalan dari sentra-sentra produksi ke pelabuhan utama (Hub) maupun pelabuhan pelabuhan *feeder*.
- Pelaksanaan asas *cabotage* dalam sektor transportasi laut.
- Pembenahan ketersediaan pasokan energi listrik dan gas bagi kelancaran produksi nasional.
- Peningkatan efisiensi dan efektifitas produksi sehingga dapat bersaing dengan produk-produk dari luar utamanya dari RRC.
- Peningkatan iklim usaha yang kondusif, antar lain melalui pemberian insentif/subsidi ekspor, perluasan peraturan investasi yang transparan, efisien dan ramah dunia usaha.
- Pengamanan pasar domestik, baik dengan meningkatkan pengawasan di *border points*, peredaran barang di pasar lokal maupun promosi penggunaan produksi dalam negeri.
- Peningkatan kemampuan dalam penguasaan teknologi informasi dan komunikasi termasuk promosi pemasaran dan lobby bagi para pelaku usaha, baik di lingkungan BUMN maupun terutama di kalangan Koperasi dan UKM, dalam rangka mendorong penguatan ekspor nasional.
- Pemberian insentif fiskal dan subsidi bunga pada sektor industri yang terkena dampak FTA.

5. Komisi VI DPR RI meminta Pemerintah untuk mengambil kebijakan dan langkah-langkah konkrit untuk jangka waktu 6 (enam) bulan ke depan, dan selanjutnya Komisi VI DPR RI akan membentuk Panitia Kerja (Panja) Pelaksanaan AC-FTA guna mengawasi pelaksanaan butir 1 sampai dengan butir 4 di atas.

### III. PENUTUP

Rapat Kerja ditutup pada pukul 18.08 WIB.

Jakarta, 20 Januari 2010  
PIMPINAN KOMISI VI DPR RI  
KETUA RAPAT,



IR. H. AIRLANGGA HARTARTO, MMT, MBA  
No. A-212